

## UPAYA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH KOTA BEKASI MENJAGA UMKM DALAM MENGHADAPI KRISIS DI MASA PANDEMI COVID 19

Hasanuddin  
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi  
e-mail: [hasanuddin@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:hasanuddin@dsn.ubharajaya.ac.id)

### ABSTRACT

*This study wants to know and explain the efforts made by the Central Government and the Bekasi City Government in helping MSMEs during the Covid 19 Pandemic. The method used in this research is qualitative with data collection techniques using literature studies, namely searching and collecting various information and information needed, from sources such as laws, ministerial regulations, books, journals, proceedings, articles, and online news. The COVID-19 pandemic has not only caused health problems, it has hit all sectors of human life even more. One of the sectors that was most severely affected was the economic sector. Almost all affected countries experienced negative growth, including Indonesia, which grew by minus 5.32 in the second quarter of 2020. This condition is certainly very difficult to be able to rise quickly amid the sluggish world economy. In the midst of difficulties, the government continues to try not to get too carried away by the flow of Covid 19. However, the economic sector, especially UMKM, is experiencing very severe difficulties, even though MSMEs are the driving force of the national economy. This prompted the government to make a National Economic Recovery (PEN) policy for UMKM and allocate a budget of Rp. 123.5 trillion. The efforts made by the Bekasi City Government by preparing funds of Rp. 37 billion which will be distributed to UMKM affected by Covid 19. In addition, the Bekasi City Government accelerates various activities so that UMKM can survive in the midst of difficulties.*

*Key words: Pemerintah, Kota Bekasi, Covid 19, UMKM*

History of article	Received: 10-10-2021	Reviewed: 30-11-2021	Revised: 10-12-2021	Accepted: 20-12-2021	Published: 30-12-2021
--------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	-----------------------

### PENDAHULUAN

Awal tahun 2020 Virus Corona (Covid 19) menginfeksi pasien di salah satu rumah sakit di Kota Wuhan. Saat ini virus tersebut telah menyebar ke 224 negara, dengan jumlah orang yang terpapar secara global mencapai 256.478.096, sedangkan yang meninggal 5.150.435 orang, dan yang sembuh 231,686,800 orang, (Worldometers, 2021). Sementara di Indonesia termasuk di Kota Bekasi jumlah yang terpapar Covid 19 mencapai 4.253.098 orang, yang sembuh 4.101.216, dan meninggal mencapai 143.728, (COVID-19, 2021). Sedangkan Kota Bekasi terdapat 86.057 kasus, sembuh 84.900, (Waluyo, 2021). Begitu

cepatnya penyebaran virus ini membuat negara-negara dan kota-kota di dunia panik karena tidak siap mengantisipasi situasi yang begitu cepat.

Para ilmuwan terutama dibidang kesehatan disibukkan mencari dan membuat obat penawar virus covid agar penyebarannya dapat diatasi, namun membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat memproduksinya (baca vaksin). Walau demikian, muncul sebuah keyakinan bahwa proses penyebaran yang begitu cepat melalui kontak diantara manusia. Berdasarkan keyakinan itu dibuat sebuah kebijakan untuk membatasi mobilitas manusia. Hampir semua negara yang terpapar Covid 19 melakukan Lock Down untuk mengurangi reziko penularan.

Indonesia melakukan hal yang sama walau dengan istilah yang berbeda yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), lalu PSBB transisi, terus berubah menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, selanjutnya menjadi PPKM empat level. Apapun istilah yang digunakan di masing-masing negara, tujuannya sama yaitu membatasi aktivitas masyarakat diluar rumah agar penularan Virus Covid 19 dapat diputus.

Pembatasan yang dilakukan berbagai negara termasuk Indonesia membawa konsekuensi baru yaitu terganggunya berbagai aktivitas masyarakat. Salah satu aktivitas yang terdampak adalah sektor ekonomi, hal tersebut mengakibatkan pertumbuhan ekonomi dibanyak negara sejak Covid 19 2020 terkoreksi cukup ekstrim bahkan menyebabkan resesi. Beberapa negara yang mengalami pertumbuhan negatif di antaranya: Jepang minus 4,8 persen, Jerman negatif 5 persen, Perancis minus 8,2 persen, Amerika Serikat minus 3,5 persen, Italia kontraksi 8,9 persen, Inggris bahkan mengalami kontraksi 9,9 persen. Pertumbuhan negatif juga dialami beberapa negara di ASEAN, yang terparah Filipina mengalami kontraksi 9,5 persen, Malaysia minus 5,6 persen, Singapura minus 5,4 persen, Thailand mengalami kontraksi 6,1 persen. Sama dengan negara ASEAN lainnya, ekonomi Indonesia juga mengalami tekanan kuat dan kontraksi 5,32 persen pada triwulan II tahun 2020. Di ASEAN hanya Vietnam yang tumbuh positif 2,91 persen pada 2020.

Pertumbuhan negatif pada ekonomi global termasuk Indonesia berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan (Ertur & Koch, 2007), bahwa pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tidak hanya dipengaruhi oleh determinan di wilayah itu sendiri, tetapi dipengaruhi juga oleh determinan dari wilayah lain dan pertumbuhan ekonomi wilayah lain. Saat

ini konektivitas antar wilayah semakin kuat dan saling mempengaruhi satu dengan lainnya termasuk dalam masalah ekonomi. Tidak ada satu wilayah yang ekonominya tumbuh positif karena kemampuannya sendiri, melainkan mendapat dukungan yang baik dari wilayah lainnya. Termasuk pertumbuhan ekonomi nasional, ditentukan bagaimana kinerja ekonomi di daerah. Sementara ekonomi daerah digerakkan oleh aktivitas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Pada masa pandemi ini, UMKM merupakan salah satu sektor yang terdampak secara negatif bahkan banyak yang usahanya terhenti, sekitar 30 persen yang usahanya terganggu. Sedangkan yang terganggu tapi menciptakan inovasi-inovasi kreatif sekitar 50-70 persen. (Santia, 2020). Walau demikian UMKM terbukti merupakan salah satu usaha yang dapat bertahan dalam krisis ekonomi yang pernah terjadi di Indonesia termasuk saat krisis akibat Covid 19, sehingga termasuk dalam salah satu fokus program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia.

UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Jumlah UMKM di Indonesia yakni sebesar 64,19 juta, di mana komposisi Usaha Mikro dan Kecil sangat dominan yakni 64,13 juta atau sekitar 99,92% dari keseluruhan sektor usaha. Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak buruk terhadap UMKM. Sesuai rilis Katadata Insight Center (KIC), mayoritas UMKM (82,9%) merasakan dampak negatif dari pandemi ini dan hanya sebagian kecil (5,9%) yang mengalami pertumbuhan positif. (Siaran Pers, 2021a).

Terdampaknya sektor UMKM akibat Covid 19 dialami juga oleh UMKM yang berada di Kota Bekasi. Aktivitas terhenti akibat kebijakan PPKM yang mengharuskan setiap masyarakat mengurangi bahkan menghentikan kegiatannya untuk sementara. Hal tersebut tentu menyebabkan melambatnya atau

bahkan terhentinya proses ekonomi pada sektor UMKM di Kota Bekasi. Kondisi ini mengharuskan Pemerintah Kota Bekasi (Pemkot Bekasi) menemukan formulasi agar UMKM dapat bertahan dalam situasi sulit. Penelitian ini dilakukan untuk melihat dan menjelaskan upaya saja yang telah dilakukan pemerintah termasuk Pemkot Bekasi dalam upaya menjaga UMKM agar dapat bertahan dalam keadaan sulit.

### TINJAUAN LITERATUR

Mengembangkan dan memperkuat daya tahan UMKM dalam situasi apapun tidak terlepas dari campur tangan pemerintah. Penelitian tentang Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia yang dilakukan oleh (Anggraeni et al., 2021) berusaha meng-highlight kebijakan pemerintah dalam memperkuat UMKM di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini juga berupaya memetakan kebijakan dan strategi pemerintah dalam memperkuat UMKM. Lebih lanjut penelitian menunjukkan beberapa skema perlindungan UMKM dan strategi yang dilakukan pemerintah yaitu: (a) pemberian bantuan sosial kepada pelaku UMKM miskin dan rentan (b) intensif pajak bagi UMKM (c) relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi UMKM (d) Perluasan Pembiayaan Model Kerja UMKM (e) Penyediaan Penyangga Produk. Untuk mendukung agar kebijakan terhadap UMKM dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan strategi, baik strategi jangka pendek maupun strategi jangka panjang. Strategi jangka pendek tentu saja berkaitan dengan kampanye dan penerapan protokol kesehatan yang ketat, pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung kegiatan UMKM, memberi kemudahan dan menyederhanakan proses administrasi, yang tidak kalah pentingnya dalam strategi jangka pendek adalah mendorong perubahan strategi bisnis. Sedangkan strategi jangka panjang, perlu adanya road map pengembangan UMKM, membangun teknologi digital sebagai platform dalam bisnis UMKM, pengembangan model bisnis UMKM yang modern, serta perlu mendorong dan membangun kolaborasi antara

pemerintah, korporasi besar, dan pelaku sektor UMKM.

Dalam situasi krisis sektor usaha yang seringkali terdampak paling awal adalah UMKM, karena itu dibutuhkan sebuah strategi agar UMKM dapat terus bertahan. Penelitian mengenai Strategi Bertahan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19 mencoba menjelaskan strategi bertahan UMKM. Berdasarkan hasil observasi penelitian ini menjelaskan bahwa UMKM rata-rata mengalami penurunan penjualan selama wabah Covid19. Hal ini disebabkan berkurangnya aktivitas di luar rumah, kesulitan pengadaan bahan baku akibat pembatasan transportasi, dan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap produk yang tersedia di luar rumah, khususnya bidang kuliner. UMKM, salah satu penopang utama perekonomian dengan menyediakan banyak lapangan pekerjaan, juga diberhentikan dari Covid 19 ini untuk waktu yang terbatas karena harus memberhentikan pekerja atau menutup sementara perusahaan dan bisnis. Pengamatan lain bahwa semua UMKM mengalami penurunan penjualan dan harus ditutup adalah masih memiliki pertumbuhan penjualan yang stabil karena memiliki strategi pemasaran yang berbeda untuk menyesuaikan produk mereka dan bertahan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan UMKM karena perusahaan yang bisa bertahan adalah yang merespon perubahan lingkungan. Misalnya, memutuskan apakah akan memulai lini produk baru atau memperbarui sistem pemasaran. Dalam penelitian ini menawarkan beberapa strategi bertahan bagi UMKM agar bisnis dapat tetap berjalan. Pertama, banyak orang yang mencari belanja online, jadi penjualan melalui e-commerce. Kedua, pemasaran produk menggunakan teknologi digital untuk menjangkau lebih banyak konsumen (digital marketing). Ketiga, meningkatkan mutu dan kualitas produk serta jenis pelayanan. Keempat, melakukan customer relationship marketing untuk membangun kepercayaan konsumen dan loyalitas pelanggan. (Laura Hardilawati, 2020).

Penelitian lainnya yang menggambarkan tantangan dan upaya memperkuat perekonomian nasional melalui upaya penguatan UMKM yaitu penelitian tentang Peluang dan Tantangan UMKM Dalam Upaya Memperkuat Perekonomian Nasional Tahun 2020 Ditengah Pandemi Covid 19. Bahwa

tantangan UMKM di tahun 2020 bukan hanya merebaknya Covid 19, tetapi juga layanan Internet atau produk dan layanan UMKM di pasar yang tidak menjangkau pasar selain lokal atau daerah terpencil dan sudah memiliki pasar. Perusahaan besar dapat dengan mudah mendapatkan pelanggan. Dikenal dengan layanan internet tak terbatas, Anda bisa menjadi internasional. Salah satu indikator keberhasilan daerah atau regional adalah aspek ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi diukur dengan bertambahnya jumlah wirausahawan yang dimulai pada tingkat usaha mikro dan kecil kemudian berkembang menjadi usaha besar. Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UKM sehubungan dengan pendelegasian Undang-Undang No. XVI/MPRRI/1998 Dewan Nasional Republik Indonesia tentang Kebijakan Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi UKM dan Undang-Undang Republik sebagai bagian internal perekonomian yang memiliki potensi strategis, maka perlu untuk dapat mewujudkan struktur perekonomian yang diharapkan lebih maju, maju dan adil.

Penelitian ini menjelaskan bahwa Pemerintah menawarkan para pelaku UMKM berbagai cara untuk berbisnis, dan pemerintah telah menginstruksikan Menteri keuangan untuk memberi subsidi bunga kepada pelaku UMKM, insentif pajak untuk menunda pembayaran modal, dan UMKM. Kami memperhatikan UMKM dengan meminta dukungan untuk tawaran itu. Dengan tambahan pinjaman modal kerja. Peluang lain adalah bersama-sama menggerakkan 100.000 UMKM secara online di 30 kota atau kabupaten di Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai sumber energi digital di Asia. Tantangan UMKM adalah bagaimana menghadapi strategi dalam mengisi kebutuhan pasar dalam negeri maupun pasar global, Bagaimana UMKM memiliki strategi entrepreneurship yang berbasis teknologi IT (Information Technology) dan menjaga kearifan lokal. Peluang yang telah diberikan oleh pemerintah ini diharapkan bisa membantu dan bermanfaat bagi pelaku UMKM di tengah wabah Covid 19 yang saat ini berlangsung baik di Indonesia maupun di hampir seluruh negara di dunia ini. (Marlinah, 2020).

Penelitian lain tentang Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19 di lakukan oleh

(Sugiri, 2020), bahwa Hampir di setiap negara, termasuk Indonesia, UMKM terkena dampak Covid19. Dampaknya adalah kerugian penjualan, masalah permodalan, hambatan distribusi produk, dan masalah bahan baku. Pemerintah telah mengumumkan kebijakan untuk memberdayakan UMKM dalam situasi pandemi COVID-19. Ada beberapa skema perlindungan UMKM yang diterapkan oleh pemerintah. Yaitu, (a) memberikan dukungan sosial kepada pelaku UMKM miskin dan rentan, dan (b) memberikan insentif pajak kepada UMKM. (c) Mitigasi UMKM dan restrukturisasi kredit. (d) Perluasan modal kerja UMKM. (e) Menyediakan kementerian, badan usaha milik negara dan pemerintah daerah sebagai penyangga produk UMKM. Dan (f) pelatihan e-learning.

Dampak Covid-19 Terhadap UMKM Di Indonesia merupakan penelitian yang dilakukan oleh (Thaha, 2020), Dampak ekonomi dari merebaknya Covid-19 dirasakan di seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia yang memberikan dampak ekonomi yang luar biasa. Dalam hal ini, UMKM akan terkena dampak paling parah dari krisis ini, mengingat kontribusi UMKM terhadap jumlah unit usaha, kontribusinya terhadap PDB, penyerapan tenaga kerja, ekspor, dan investasi dalam perekonomian Indonesia. Pemerintah akan mendukung pemulihan dan revitalisasi UMKM di Indonesia melalui berbagai dukungan dan langkah pemerintah untuk mendukung proyek UMKM. Kebijakan pemerintah berkisar dari kebijakan jangka pendek dan tindakan darurat jangka menengah, termasuk memastikan dunia usaha beroperasi secara langsung, menjaga kelangsungan sektor logistik, dan mendorong kemandirian industri alat kesehatan. strategi jangka menengah, dan jangka panjang. Di sisi lain, strategi jangka panjangnya adalah memperkenalkan dan memanfaatkan teknologi digital bagi UMKM dan bersiap memasuki era industri 4.0.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Peneliti mengumpulkan, mengkaji dan mendeskripsikan berbagai gejala dan upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menjaga daya tahan UMKM yang diakibatkan oleh Covid-19. Teknik pengumpulan data

menggunakan studi pustaka yaitu melakukan pencarian dan mengumpulkan berbagai informasi dan keterangan yang dibutuhkan dari sumber seperti undang-undang, peraturan menteri, buku, jurnal, proseding, artikel, dan berita online.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Upaya Pemerintah Pusat Menjaga Daya Tahan UMKM Akibat Covid 19

UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Namun, tingginya jumlah UMKM di Indonesia juga tidak terlepas dari tantangan yang ada. Untuk menjawab tantangan itu, Pemerintah telah menjalankan sejumlah program dukungan UMKM, diantaranya bantuan insentif dan pembiayaan melalui program PEN, Kredit Usaha Rakyat, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), Digitalisasi pemasaran UMKM, Penguatan Wirausaha Alumni Program Kartu Prakerja Melalui Pembiayaan KUR, dan termasuk pula strategi jangka panjang menaikkan kelas UMKM melalui UU Cipta Kerja. (Siaran Pers, 2021b).

Berbagai kebijakan yang digagas pemerintah dan dana yang dialokasikan secara khusus bertujuan untuk membantu UMKM yang terdampak Covid 19. Kebijakan ini dikenal dengan Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bagi UMKM. Total anggaran yang dialokasikan untuk mendukung UMKM juga cukup besar, yakni senilai Rp.123,5 triliun atau setara dengan 17,7% dari total stimulus APBN dari cost of action Covid-19 sebesar Rp.695,2 triliun. Sebagai perbandingan, kebijakan PEN mendanai

sektor lain seperti sektor kesehatan sebesar Rp87,6 triliun, sedangkan untuk sektor korporasi sebesar Rp.53,6 triliun, dan untuk pendanaan kementerian dan lembaga senilai Rp.106.100 miliar. Sekali lagi, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat tertarik untuk menghidupkan kembali UMKM sebagai mesin penggerak perekonomian. (Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, 2020).

Selanjutnya presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 mengenai rincian alokasi anggaran kebijakan PEN UMKM meliputi:

- 1) Subsidi bunga Rp35,3 triliun;
- 2) Penempatan dana untuk restrukturisasi dan relaksasi kredit bank Rp.78,8 triliun;
- 3) Belanja imbal jasa penjaminan (IJP) kredit Rp.5,0 triliun;
- 4) Penjaminan untuk modal kerja Rp1,0 triliun;
- 5) PPh final UMKM ditanggung pemerintah (DTP) Rp.2,4 triliun;
- 6) Pembiayaan investasi kepada koperasi Rp.1,0 triliun. (Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, 2020).

Selain itu pemerintah melalui Menteri Keuangan mengeluarkan kebijakan mengenai insentif pajak bagi pelaku UMKM, dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) PMK-44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Hal yang harus dipastikan terlebih dahulu oleh wajib pajak (WP) yang ingin memanfaatkan kebijakan ini adalah yang memiliki peredaran bruto tertentu dan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) final berdasarkan PP nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Kebijakan bagi UMKM juga dilaksanakan dengan menunda pembayaran pokok dan memberikan

subsidi bunga pinjaman kepada usaha kecil dan kecil (kredit sampai dengan Rp 500 juta) melalui BPR, bank dan perusahaan pembiayaan, serta Kredit Korporasi Rakyat (KUR) 6% untuk 3 bulan pertama dan% untuk 3 bulan kedua dan penangguhan dukungan pokok dan bunga pinjaman untuk perusahaan menengah (pinjaman 500 juta dari Rp menjadi Rp 10 miliar) melalui BPR, bank dan perusahaan keuangan turun 3% untuk yang pertama 3 bulan dan 2% untuk 3 bulan kedua. Kebijakan ini semakin lengkap dengan terbitnya PMK Nomor 65/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Suku Bunga/Alokasi Margin Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk Mendukung Pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional.

Dalam PMK tersebut diatur Kriteria UMKM yang dapat memperoleh subsidi bunga/margin, antara lain:

1. Memiliki plafon kredit/pembiayaan paling tinggi Rp10.000.000.000;
2. UMKM yang memiliki sisa pokok (Baki Debet) kredit/pembiayaan sebelum masa pandemic COVID-19 (terdapat baki debet sampai dengan 29 Februari 2020);
3. Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional;
4. Memiliki kategori performing loan lancar (kolektibilitas 1 atau 2) dihitung per 29 Februari 2020; dan
5. Memiliki NPWP atau mendaftar untuk mendapatkan NPWP.

Kebijakan ini sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang bertujuan untuk mendukung kebijakan keuangan Negara dalam menghadapi pandemi. Corona virus 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman tersebut membahayakan perekonomian dan/atau stabilitas sistem. Membiayai dan menyelamatkan perekonomian nasional. PP 23/2020 ini juga memunculkan PMK Nomor 64

/PMK.05/2020 tentang pengaturan sumber permodalan bagi bank peserta dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

### **Upaya Pemerintah Kota Bekasi Menjaga Daya Tahan UMKM Akibat Covid 19**

Berdasarkan data statistik, total ada 23.000 pelaku UMKM di Kota Bekasi. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Bekasi mencatat ada sebanyak 3000 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, (UMKM) terdaftar. Tentu saja ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkot Bekasi sebab masih ada sekitar 20.000 UMKM yang belum terdaftar. Walau demikian, Pemkot berupaya memberikan fasilitas bagi UMKM baik yang telah terdaftar maupun yang belum terdaftar.

Dimasa Pandemi Covid 19 ini, Pemkot Bekasi menyiapkan anggaran sebesar Rp. 37 Miliar bantuan bagi UMKM, anggaran tersebut dialokasikan untuk menjaga agar UMKM dapat bertahan dimasa sulit. Selain itu Pemkot Bekasi dalam menjaga daya beli masyarakat menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk membantu perekonomian masyarakat agar roda ekonomi terutama sektor UMKM dapat tetap berjalan. Terobosan lain yang dilakukan Pemkot Bekasi untuk membangkitkan sektor UMKM adalah dengan melakukan kegiatan Bekasi UMKM Fest 2021. Kegiatan dimaksudkan untuk membangkitkan UMKM di masa pandemi dengan mengadakan berbagai pelatihan bagi pelaku UMKM. Kegiatan tersebut juga diisi dengan bazar yang memasarkan produk UMKM untuk memperkenalkan dan menarik pembeli.

Upaya lain yang dilakukan Pemkot Bekasi adalah memberikan insentif pengurangan ketetapan dan penghapusan sanksi administrasi pembayaran pajak daerah bagi UMKM di masa pandemic yang mulai berlaku 1 September hingga 20

Desember. Kebijakan tersebut diambil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tertekan akibat Covid 19. Pemkot Bekasi juga memberikan keringanan pajak dan retribusi, kemudahan permodalan mulai dari penyaluran pinjaman bunga rendah sampai bantuan modal usaha mikro. Selain itu, pemberian sertifikasi halal pada sektor usaha rumah tangga. Agar pelaku usaha UMKM dapat bertahan dan mengembangkan usahanya diberikan pelatihan digitalisasi dan membangun kerjasama marketplace.

Berbagai upaya yang telah dilakukan Pemkot Bekasi untuk membuat sektor ekonomi kembali berjalan membuahkan hasil positif dengan munculnya kembali kepercayaan investor untuk berinvestasi di Kota Bekasi. Hal ini dapat dilihat pada triwulan II periode April-Juni tahun 2021, investasi yang masuk mencapai Rp. 2,3 triliun. Hal ini dapat menjelaskan bahwa kepercayaan investor pada Pemkot Bekasi mulai tumbuh. Tentu salah satunya karena melihat kesungguhan dalam menggerakkan ekonomi dan membantu UMKM untuk bertahan dan bangkit di tengah krisis akibat Pandemi Covid 19.

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa hampir semua negara didunia tidak lepas dari virus Covid 19. Hal tersebut berdampak pada sektor ekonomi, sebab dunia saat ini terkoneksi satu dengan lainnya, artinya satu negara terganggu terutama negara raksasa ekonomi dunia akan berdampak langsung pada negara lainnya. Salah satu negara yang terinveksi Virus Covid 19 adalah Indonesia, menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi minus. Hal ini tentu saja berimbas daerah lainnya salah satunya adalah Kota Bekasi.

Pelaku ekonomi yang terdampak sangat parah adalah pelaku usaha UMKM yang

sebelumnya merupakan motor penggerak ekonomi nasional. Oleh karena itu pemerintah pusat melakukan berbagai upaya agar UMKM tidak jatuh terlalu dalam sehingga mudah bangkit kembali. Berbagai kebijakan yang memihak UMKM dibuat, diantaranya menyiapkan anggaran Rp.123,5 triliun yang dikenal dengan Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bagi UMKM. Pengalokasian anggaran tersebut menjelaskan kesungguhan pemerintah pusat menjaga pilar ekonominya yaitu UMKM.

Hal yang sama dilakukan Pemkot Bekasi dengan menyiapkan anggaran sebesar Rp. 37 miliar untuk stimulus UMKM. Selain itu Pemkot Bekasi mengakselerasi berbagai kegiatan agar UMKM dapat bertahan. Seperti Bekasi Fest 2021, pelatihan bagi pelaku UMKM, membangun jejaring dengan pihak swasta, mempermudah akses modal, meringkankan bahkan menghapuskan beberapa bulan pajak dan retribusi bagi pelaku usaha.

### Saran

Sebagai pilar perekonomian nasional, kontribusi UMKM terhadap PDB sekitar 61,07% atau setara dengan Rp.8.573,89 triliun. Dengan jumlah 64,2 juta, UMKM menyerap tenaga kerja mencapai 97%. Data tersebut menjelaskan begitu pentingnya eksistensi UMKM, sehingga perlu perhatian ekstra pada sektor tersebut karena mampu menjadi jangkar dalam situasi apapun juga.

Karena itu segala hambatan baik itu berupa regulasi ataupun akses ke modal/perbankan perlu direlaksasi. Termasuk hambatan pada sumber daya manusia pelaku UMKM itu sendiri dan pemanfaatan teknologi harus terus ditingkatkan. walaupun ini menjadi tanggung jawab bersama, namun tanggung jawab terbesar ada pada pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, W. C., Ningtiyas, W. P., & Nurdiyah, N. (2021). Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 3(1), 47–65.
- Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. (2020). Laporan Kajian Program Bantuan Modal Usaha Mikro.
- COVID-19, S. T. P. (2021, November 20). Data Sebaran. <https://covid19.go.id/> Diakses 20 November 2021
- Ertur, C., & Koch, W. (2007). Growth, technological interdependence and spatial externalities: theory and evidence. *Journal of Applied Econometrics*, 22(6), 1033–1062.
- Hartomo, G. (2019, June 19). UMKM Sumbang Rp8.400 Triliun ke Perekonomian Nasional pada 2018. <https://economy.okezone.com/read/2019/06/19/320/2068296/umkm-sumbang-rp8-400-triliun-ke-perekonomian-nasional-pada-2018>. Diakses 17 November 2021
- Investasi/BKPM, K. (2021). Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/pertumbuhan-ekonomi-di-indonesia>. Diakses 21 November 2021
- Laura Hardilawati, W. (2020). Strategi Bertahan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 10(1), 89–98.
- Marlinah, L. (2020). Peluang dan Tantangan UMKM Dalam Upaya Memperkuat Perekonomian Nasional Tahun 2020 Ditengah Pandemi Covid 19. *Jurnal Ekonomi*, 22(2), 118–124.
- Santia, T. (2020, September 4). Berapa Jumlah UMKM di Indonesia? Ini Hitungannya. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4346352/berapa-jumlah-umkm-di-indonesia-ini-hitungannya>. Diakses 17 November 2021
- Siaran Pers. (2021a, April 28). Dukungan Pemerintah Bagi UMKM Agar Pulih di Masa Pandemi. Biro Komunikasi, Layanan Informasi, Dan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2939/dukungan-pemerintah-bagi-umkm-agar-pulih-di-masa-pandemi>. Diakses 21 November 2021
- Siaran Pers. (2021b, May 5). UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia. Biro Komunikasi, Layanan Informasi, Dan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia>. Diakses 21 November 2021
- Sugiri, D. (2020). Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dari Dampak Pandemi Covid-19. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 19(1), 76–86.
- Thaha, A. F. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia. *BRAND Jurnal Ilmiah Manajemen Pemasaran*, 2(1), 147–153.
- Waluyo, D. (2021, November 17). Pemkot Bekasi Catat 18 Kasus Baru Covid-19 pada 11-17 November 2021. <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/11/18/18555121/pemkot-bekasi-catat-18-kasus-baru-covid-19-pada-11-17-november-2021>. Diakses 20 November 2021
- Worldometers. (2021, November 19). Reported Cases and Deaths by Country or Territory. <https://www.worldometers.info/coronavirus/>. Diakses 19 November 2021